

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam dunia politik internasional, interaksi antarnegara merupakan elemen yang sangat penting. Dengan berinteraksi dengan negara lain, suatu negara dapat melaksanakan kebijakan dan politik luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Bentuk dari interaksi antarnegara itu dapat berupa kerja sama maupun konflik. Dari adanya interaksi antarnegara tersebut menyebabkan terjadinya hubungan saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, terutama bergantungnya negara kecil pada negara besar. Baik ketergantungan dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.

Ketergantungan yang tercipta dari adanya hubungan antarnegara bisa membawa keuntungan maupun kerugian bagi masing-masing negara. Bagi negara besar apabila ada negara-negara kecil yang bergantung padanya, hal ini akan membawa keuntungan bagi negara tersebut. Negara kecil yang sangat bergantung pada negara besar merupakan sasaran yang tepat bagi negara besar untuk menanamkan pengaruhnya, terutama dalam hal perilaku politik. Negara tersebut juga dapat menerapkan segala macam kebijakannya yang biasanya akan merugikan bagi negara kecil.

Ketergantungan yang diciptakan oleh negara besar pada negara kecil mendatangkan dampak yang buruk bagi negara kecil. Negara kecil menjadi tidak mandiri dalam melaksanakan pembangunan negaranya. Kadang-kadang pemerintahan di negara kecil mendapat tekanan yang sangat besar dari negara

besar. Oleh karena itu di dalam negeri negara kecil sering terjadi konflik yang disebabkan oleh tingginya pengaruh negara besar terhadap arah kebijakan dan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah negara kecil. Hal inilah yang sering menimbulkan masalah yang memicu terjadinya konflik dalam negeri di suatu negara.

Konflik yang terjadi di suatu negara bisa memberi dampak besar bagi negara lain. Hal ini terjadi karena adanya ketergantungan dari negara tersebut pada negara lain, yang biasanya mempunyai kekuatan yang lebih besar. Dalam kasus Fiji, penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer tidak begitu memberikan ancaman bagi negara-negara di sekitar Fiji. Sehingga peristiwa itu tidak begitu berpengaruh terhadap politik luar negeri negara-negara tersebut. Akan tetapi keadaan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Australia. Pemerintah Australia telah mengambil sikap untuk menanggapi kudeta yang terjadi di Fiji. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari pemimpin pemerintahan yang terguling pada pemerintah Australia untuk mengirimkan pasukan militer Australia guna mengamankan situasi dalam negeri Fiji.¹

Pemerintah Australia menolak permintaan yang diajukan oleh pemimpin pemerintahan Fiji yang terguling dengan mengambil sikap untuk tidak mengirimkan pasukan militer Australia ke Fiji. Sikap ini diambil tidak semata-mata hanya karena pemerintah Australia tidak mau memberikan bantuan pada Fiji, tetapi sikap ini diambil melalui suatu pemikiran berdasarkan pertimbangan-

¹ Dwi Arjanto, *Australia Tolak Permintaan PM Fiji Kirim Tentara* (diakses pada 3 Januari 2008); sumber <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/12/05/brk,20061205-88923.id.html>

pertimbangan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak akan merugikan bagi pemerintah Australia. Selain itu diharapkan agar sikap yang diambil oleh pemerintah Australia juga tidak akan membawa dampak yang buruk bagi Fiji.

Fenomena yang terjadi di Fiji menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sehingga kajian ini akan menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam membahas, mengkaji dan meneliti permasalahan ini, penulis telah menetapkan “SIKAP AUSTRALIA TERHADAP KUDETA MILITER FIJI TAHUN 2006” sebagai judul dari skripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Pasifik memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik yang terjadi di kawasan ini yang melibatkan negara-negara besar. Dari beberapa negara yang ada di kawasan ini, sebagian di antaranya merupakan bekas jajahan negara-negara besar di Eropa.

Kawasan Oceania atau yang lebih dikenal dengan sebutan kawasan Pasifik Selatan, terdiri dari sekitar dua puluh negara yang berbentuk pulau dan beberapa wilayah yang merupakan bagian dari Australia.² Walaupun hanya terdiri atas beberapa negara kecil, tetapi keberadaan kawasan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena sebagian dari negara-negara kecil ini berada di bawah kekuasaan negara-negara besar Eropa seperti Inggris dan Perancis.

² Gary Smith and Dave Cox, *Australia In The World: An Introduction to Australian Foreign Policy* (Oxford University Press, 1997), hal. 148.

Pada masa kolonialisme ketika negara-negara Eropa saling berlomba untuk mencari daerah jajahan baru, negara-negara tersebut saling meng-klaim bahwasanya daerah-daerah baru yang telah mereka temukan adalah milik mereka. Klaim yang mereka lakukan juga berlaku bagi Australia dan beberapa wilayah di sekitar Australia terutama pulau-pulau di kawasan Pasifik. Dari sekian banyak wilayah yang berada di kawasan Australia dan Pasifik, Inggris menjadi negara yang menguasai hampir sebagian besar dari wilayah-wilayah tersebut. Sebagian dari wilayah-wilayah itu kemudian diberi kemerdekaan oleh Inggris. Mereka membentuk suatu negara tetapi masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris dalam bentuk persemakmuran (commonwealth). Tergabungnya Australia dan beberapa negara di kawasan Pasifik, khususnya Pasifik Selatan, ke dalam Persemakmuran Inggris telah membawa negara-negara tersebut ke dalam suatu hubungan yang agak sedikit berbeda dengan hubungan yang terjalin antara negara-negara lain di dunia.

Hubungan yang terjalin antara Australia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan memang memiliki kekhususan. Selain dari faktor geografis, yang letak wilayahnya memang dekat dengan Australia, faktor sejarah juga memiliki peranan penting dalam pembentukan hubungan tersebut. Sebagian dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki latar belakang sejarah yang sama dengan Australia. Australia dan negara-negara tersebut sama-sama bekas jajahan Inggris. Bahkan ketika akan dibentuk Federasi Australia, ada dari beberapa negara tersebut yang pernah akan menjadi bagian dari Federasi Australia.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Australia adalah Fiji dan Kepulauan Solomon. Dua negara inilah yang dulu hampir menjadi bagian dari Australia dalam bentuk Federasi Australia. Meski telah terjalin kedekatan, tetapi hubungan antara Australia dan kedua negara tersebut tidak selalu harmonis. Hubungan antara Australia dengan Fiji dan Kepulauan Solomon juga pernah mengalami pasang surut. Hal ini tidak lepas dari peran Australia sebagai polisi di kawasan Pasifik yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut.³

Tetapi dari semua hubungan itu yang paling mencolok adalah hubungan yang terjalin antara Australia dan Fiji. Australia selalu memasukkan Fiji ke dalam setiap agenda kebijakan luar negerinya. Selain sebagai upaya dalam menjaga hubungan baik yang sudah terjalin sejak dulu, apa yang dilakukan oleh Australia adalah karena adanya ikatan yang mengharuskan keduanya untuk saling membantu. Tetapi adanya ikatan tersebut tidak selalu menjadi alasan bagi kedua negara tersebut, terutama Australia, untuk memberikan segala macam bantuan yang diminta oleh pihak lain. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pertentangan kepentingan antara Australia dan Fiji. Apabila pertentangan tersebut terjadi maka Australia akan sedikit mengendurkan ikatan hubungannya dengan Fiji.

Hubungan yang terjalin antara Australia dengan Fiji dalam sejarahnya selalu mengalami fluktuasi. Australia selalu merenggangkan hubungannya dengan Fiji terutama pada saat Fiji sedang mengalami gejolak. Setiap gejolak yang terjadi di

³ *Campur Tangan Militer Australia di Fiji Sebabkan Pertumpahan Darah* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000147433.html>

dalam negeri Fiji selalu berpengaruh terhadap hubungan antara Fiji dengan Australia. Hal ini terjadi karena Australia memiliki keterlibatan yang cukup tinggi terhadap kehidupan dalam negeri Fiji baik secara politik, militer maupun ekonomi.

Secara politik, Australia memiliki keterlibatan hampir di setiap sudut kehidupan politik Fiji. Dalam politik luar negeri Fiji, Australia secara tidak langsung memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap negara-negara lain di dunia untuk mendikte kebijakan dan politik luar negeri Fiji. Selain itu, Australia juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam persemakmuran terhadap setiap keputusan yang diambil ketika terjadi masalah pada anggota-anggotanya. Contoh nyata besarnya pengaruh Australia di persemakmuran terhadap Fiji adalah ketika terjadi kudeta di Fiji pada tahun 2000. Australia mengusulkan pada Sekretaris Jenderal Persemakmuran untuk membekukan keanggotaan Fiji. Bahkan akibat dari terjadinya kudeta militer pada tahun 2006, Australia telah mempengaruhi anggota persemakmuran untuk mencoret nama Fiji dari keanggotaannya.⁴ Anggota persemakmuran Inggris telah menyepakati kemungkinan bahwa Fiji akan dikeluarkan sementara dari keanggotaannya sebagai bentuk sanksi atas peristiwa yang terjadi di Fiji. Sanksi yang ditujukan pada Fiji merupakan reaksi yang diberikan oleh negara-negara lain di dunia terhadap peristiwa kudeta yang terjadi pada akhir 2006 lalu karena tindakan

⁴ *Perdana Menteri Terguling Fiji Tinggalkan Ibukota* (diakses pada 2 Maret 2008); sumber <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000147013.html>

kudeta merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai dasar persemakmuran dan ancaman bagi demokrasi di belahan dunia manapun.⁵

Dalam bidang militer, keterlibatan Australia terlihat dari adanya perwira senior polisi Australia yang mengambil alih kepemimpinan kepolisian Fiji.⁶ Adanya intervensi Australia ke Fiji mengakibatkan timbulnya kecemasan akan kemungkinan meluasnya dominasi dan hegemoni Australia di antara negara-negara Pasifik. Akan tetapi intervensi Australia terhadap Fiji bukan merupakan salah Australia semata. Campur tangan Australia bukanlah ekspresi sebuah ambisi tetapi lebih karena diminta. Otoritas Fiji yang kebetulan sudah kewalahan menghadapi kekacauan dan kerusuhan terpaksa meminta bantuan pemerintah Australia untuk turun tangan.⁷ Meskipun datang sebagai kekuatan penyelamat, kehadiran perwira dan aparat keamanan Australia menimbulkan keprihatinan. Terutama karena dibalik kehadiran pasukan keamanan Australia justru terlihat ketidakberdayaan pemerintah Fiji. Fiji dianggap gagal mengelola pemerintahan dan rakyatnya. Status sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dianggap sia-sia karena tidak mampu mendorong pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Secara ekonomi, Australia merupakan partner dagang Fiji yang paling utama. Hubungan dagang keduanya mendekati 1,4 milyar tiap tahunnya. Pada tahun 2006, Australia merupakan tujuan ekspor terbesar dan sumber impor kedua terbanyak bagi Fiji. Perdagangan barang-barang di antara keduanya pada tahun

⁵ *PM Fiji Muncul Saat Ancaman Kudeta* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000146493.html>

⁶ *Bukan Main, Pengaruh Australia di Pasifik Semakin Mencolok* (diakses pada 2 Maret 2008); sumber <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/14/opini/491762.htm>

⁷ <http://ninafizi.wordpress.com/>

2006-2007 mencapai 531 juta dolar (ekspor Australia ke Fiji 383 juta dolar: ekspor Fiji ke Australia 148 juta dolar).⁸ Ekspor Fiji ke Australia mencapai 13,8% dari seluruh total ekspor Fiji. Sedangkan impor Fiji dari Australia mencapai 23,3%.⁹ Selain itu, Australia juga merupakan negara yang paling berjasa bagi Fiji terutama dalam hal pembangunan ekonomi Fiji. Sejauh ini Australia merupakan investor asing terbesar di Fiji.

Tetapi di antara hubungan baik yang terjalin antara Australia dan Fiji di sektor perdagangan, ada masalah pelik yang terjadi dalam perekonomian Fiji. Fiji menuduh Australia berusaha untuk melakukan sabotase terhadap perekonomiannya. Australia berusaha merusak pengaturan pinjaman Fiji bersama para pemimpin dunia. Australia berusaha merusak perekonomian Fiji melalui lembaga-lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).¹⁰ ADB yang semula mencanangkan untuk memberikan bantuan bagi kebutuhan proyek modal Fiji akhirnya menanggukkan bantuan tersebut.¹¹ Menurut Menteri Keuangan Interim Fiji, Mahendra Chaudhry, Australia secara efektif melakukan pengaturan pinjaman Fiji melalui bank-bank tersebut ke Fiji. Serangan ini merupakan akibat dari kudeta militer yang terjadi di Fiji pada akhir tahun 2006.

Menghadapi kudeta yang terjadi, negara-negara di sekitar Fiji tidak terlalu merisaukan hal tersebut. Percobaan kudeta yang pernah dilakukan beberapa bulan sebelumnya tidak begitu menimbulkan perubahan yang berarti. Tetapi tidak

⁸ http://www.dfat.gov.au/GEO/fiji/fiji_brief.html

⁹ www.cia.gov/fiji

¹⁰ *Fiji Tuduh Australia Rintang Dana* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.kapanlagi.com/h/0000177997.html>

¹¹ *Ibid.*

sedikit pula dari negara-negara tersebut yang mengancam tindakan yang dilakukan oleh militer Fiji. Hal berbeda justru terjadi di Australia. Bagi Australia, sekecil apapun perubahan yang terjadi di Fiji tetap akan membuat pemerintah Australia risau. Australia tidak menginginkan sesuatu terjadi pada warga negaranya yang pada saat itu sedang berada di Fiji. Oleh karena itu pemerintah Australia mengirimkan tiga kapal untuk mengevakuasi warga negara Australia yang berada di Fiji.¹² Akan tetapi pemerintah Australia tetap menegaskan bahwa pengiriman kapal perang tersebut tidak akan digunakan sebagai kekuatan militer.¹³ Kapal tersebut baru akan difungsikan untuk melakukan evakuasi apabila kudeta tersebut menimbulkan kerusuhan.

Australia menyatakan sikap untuk tetap mendukung pemerintahan sipil terpilih pimpinan Laisenia Qarase dan mengancam keras militer Fiji yang mengambil alih kekuasaan dengan brutal dan ilegal serta menjatuhkan sanksi-sanksi pada rezim baru.¹⁴ Meskipun Australia memberikan dukungannya kepada pemerintahan sipil terpilih, Australia tetap tidak akan memberikan bantuan terutama dalam bentuk pengiriman pasukan militer ke Fiji. Sebelumnya PM Qarase secara terang-terangan telah meminta bantuan kepada pemerintah Australia untuk mengirimkan pasukan militernya ke Fiji.¹⁵ Pemerintah Australia hanya akan memberikan bantuan yang bersifat moral yaitu berupa dukungan. Dengan memberikan dukungan pada pemerintah Fiji, Australia telah membantu

¹² *Campur Tangan Militer Australia di Fiji Sebabkan Pertumpahan Darah* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000147433.html>

¹³ news.com.au

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Pemerintah Fiji Terguling* (akses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www2.kompas.com/ver1/internasional/0612/06/042821.htm>

Fiji agar tetap berada di jalurnya. Pemerintah Fiji akan sampai pada perbaikan pemerintahan. Fiji memiliki hak dan kewajiban untuk menyelesaikan urusan dalam negerinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini nantinya akan membantu Fiji menuju pada kehidupan demokrasi yang lebih matang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah “Mengapa Australia mengecam kudeta militer Fiji tetapi tidak mau mengirimkan pasukannya ke Fiji?”

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang berkaitan dengan sikap Australia terhadap kudeta militer di Fiji
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi berbagai variabel yang berkaitan dengan sikap Australia terhadap kudeta militer di Fiji
3. Sebagai syarat akademis dalam meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa sebuah kebijakan politik luar negeri diperlukan suatu teori, konsep maupun model yang berkaitan dengan pembuatan keputusan luar negeri. Dalam setiap penelitian, teori selalu menjadi bagian yang sangat penting karena teori inilah yang akan membimbing penulis untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah dikemukakan dalam pokok permasalahan. Oleh karena itu sebelum membahas lebih lanjut tentang pokok permasalahan, alangkah baiknya apabila penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi teori.

Yang dimaksud dengan teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”.¹⁶ Pernyataan yang disebut teori itu merupakan sekumpulan generalisasi. Meski merupakan kumpulan generalisasi, teori bukan hanya sekedar kumpulan generalisasi saja melainkan lebih kepada pernyataan yang menjelaskan generalisasi itu. Sebagai sarana eksplanasi, dalam prosesnya, teori akan membantu kita dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang kita teliti.

Dalam sebuah teori terdapat dua atau lebih konsep yang saling terkait sehingga menjadikan sebuah teori tersebut menjadi utuh. Konsep-konsep inilah yang merupakan pondasi yang sangat menentukan dalam terciptanya bentuk dan isi dari sebuah teori. Konsep juga berperan penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran. Konsep inilah yang akan membantu dalam mengamati sebuah fenomena empiris.

¹⁶ Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 219.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olten, kepentingan nasional didefinisikan sebagai:

“...the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of state is typically generalized conception of those elements that constitute the state’s most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well-being.”¹⁷

Menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional dalam dua hal mirip dengan konsep umum dalam konstitusi (Amerika), seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar pengertian minimum itu konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis memiliki kesamaan arti dengannya.¹⁸

Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Dalam pandangan Morgenthau, setiap negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik), serta memelihara

¹⁷ Jack C. Plano and Roy Olten, *The International Relations Dictionary* (Holt, Rinehart and Winston Inc., 1991), hal. 128.

¹⁸ Mohtar Mas’oed, *op cit*, hal. 140.

norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (identitas kultural).¹⁹ Dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik terhadap negara lain. Dalam kasus mengenai sikap Australia terhadap kudeta militer Fiji, para pemimpin Australia mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya untuk menjamin keamanan setiap warga negara.

2. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri diartikan sebagai suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara terhadap negara lain dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olten, politik luar negeri didefinisikan sebagai:

“...a strategy or planned course of action developed by the decisionmakers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.”²⁰

Dalam kasus mengenai sikap Australia terhadap kudeta militer Fiji, langkah yang diambil oleh pemerintah Australia merupakan suatu tindakan politik luar negeri. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia. Kepentingan nasional dalam hal ini bukanlah kepentingan nasional dalam arti luas yang menjadi tujuan negara, tetapi berupa kepentingan nasional yang lebih spesifik yaitu kepentingan untuk melindungi warga negara Australia yang berada di Fiji.

¹⁹ Mohtar Mas' oed, *op.cit*, hal 141.

²⁰ Jack C. Plano and Roy Olten, *op.cit*, hal. 127.

3. Model Aktor Rasional

Untuk menganalisa permasalahan sebuah kebijakan luar negeri salah satunya dapat menggunakan tiga model pembuatan keputusan luar negeri yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, yaitu model aktor rasional, model politik birokratik, dan model proses organisasi.²¹ Penggunaan model tersebut dapat membantu mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Dengan tidak bermaksud untuk menyederhanakan masalah maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan model aktor rasional.

Dalam satu buku disebutkan, rational decision making adalah:

“...the assumption, basic to most analysis of foreign policy, that decision makers are for most part agreeable to reason; that is, that they assess, rank and then choose on a logical basis from a range of policy options those that are the most satisfactory (or the least unsatisfactory) and likely to advance their interests.”²²

Gambar 1.1

MODEL AKTOR RASIONAL



Dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri dengan menggunakan model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat

²¹ Graham T. Allison and Phillip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 2ed* (Longman, 1991).

²² Cathal J. Nolan, *The Longman Guide to World Affairs* (Longman Publishers, 1995), hal. 316-317.

dari tindakan aktor rasional dari suatu pemerintah yang monolit, yaitu pemerintah yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan melakukan tindakan untuk mencapainya, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan (kepentingan nasional).

Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang terkoordinasi dan bernalar. Dalam analogi ini, individu melalui tahap-tahap intelektual menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi unit analisa dalam model pembuatan keputusan luar negeri ini adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian kebijakan luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut menggunakan kriteria optimalisasi hasil. Mereka juga diasumsikan memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan serta semua sumber-sumber yang ada yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.²³

Dalam model pembuatan keputusan ini pemerintah merupakan aktor rasional yang mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan luar negeri dimana dalam pembuatan keputusan tersebut didasarkan pada tuntutan dalam

²³ Mohtar Mas' oed, *op.cit*, hal. 235.

negeri maupun kepentingan nasional. Pemerintah sebagai aktor rasional kemudian menjalankan keputusannya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya peristiwa kudeta militer di Fiji merupakan ancaman dan bisa membawa kerugian bagi Australia. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Australia sebagai pihak yang memegang kekuasaan negara, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi dari masing-masing alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dengan merujuk pada data-data serta informasi-informasi yang telah diperoleh, pemerintah Australia dapat membuat keputusan untuk menetapkan sebuah sikap mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap kudeta militer yang terjadi di Fiji.

Australia menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan sipil terpilih Fiji dan mengecam kudeta militer Fiji.²⁴ Dalam menyikapi kudeta militer yang terjadi di Fiji, Australia memiliki dua pilihan yaitu mengirimkan pasukan militernya ke Fiji atau tidak mengirimkan pasukan militernya ke Fiji. Apabila Australia mengirimkan pasukan militernya ke Fiji maka Australia akan mendapatkan kecaman dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara lain yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Negara-negara tersebut telah menyatakan kecaman terhadap kudeta Fiji dan menanggukkan berbagai bantuannya ke Fiji.

Keputusan untuk mengirimkan pasukan militer Australia ke Fiji juga berpotensi terhadap adanya kemungkinan terjadinya baku tembak antara pasukan

²⁴ *Pemerintah Fiji Terguling* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.kompas.com/ver1/Internasional/0612/06/042821.htm>

militer Australia dengan pasukan militer Fiji.²⁵ Keadaan seperti ini akan mengancam keselamatan warga sipil baik penduduk Fiji maupun warga negara asing yang pada saat itu sedang berada di Fiji. Walaupun secara ekonomi dan militer Australia lebih kuat daripada Fiji, pengiriman pasukan ke Fiji tetap akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Tidak adanya kepentingan Australia terhadap kudeta Fiji akan membuat pengiriman pasukan ke Fiji menjadi sia-sia karena tidak ada tujuan yang tepat. Australia tidak harus membenahi aturan hukum, penguasaan ekonomi, maupun memperbaiki perlengkapan pemerintah.²⁶ Kudeta Fiji tidak sampai menimbulkan kekacauan pada aspek-aspek tersebut.

Apabila Australia mengambil keputusan untuk tidak mengirimkan pasukan militernya ke Fiji maka Australia hanya akan mendapatkan kecaman dari beberapa negara kecil di sekitar kawasan Pasifik Selatan.²⁷ Dan dengan tidak mengirimkan pasukan militernya ke Fiji berarti Australia telah menutup adanya kemungkinan terjadinya perang terbuka dengan pihak militer Fiji. Tidak adanya pihak asing dalam konflik tersebut dapat mengurangi resiko jatuhnya korban yang tidak diinginkan.

Keputusan Australia yang tidak mau mengirimkan pasukan militernya ke Fiji juga didasarkan pada tidak adanya kepentingan Australia terhadap kudeta Fiji.²⁸ Kudeta yang terjadi di Fiji tidak menimbulkan pergolakan yang mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi Fiji. Masyarakat Fiji tetap

²⁵ *Kudeta Militer Melanda Fiji* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/06/int01.htm>

²⁶ *Defence and Security* (diakses pada 9 September 2008); sumber http://www.dfat.gov.au/facts/defence_security.html

²⁷ *Op.cit.*, <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000147433.html>

²⁸ *Australia Tolak Permintaan PM Fiji Kirim Tentara* (diakses pada 3 Januari 2008); sumber <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/12/05/brk,20061205-88923,id.html>

dapat melakukan aktivitas mereka seperti hari-hari biasanya, bahkan aktivitas perdagangan tetap berjalan normal. Jadi secara keseluruhan relatif tidak mengganggu kepentingan Australia. Selain itu, kudeta tersebut juga berlangsung dengan tenang, bukan suatu pertumpahan darah dan tidak memakan korban.²⁹ Kondisi yang terjadi di Fiji tersebut belum dapat membuat masyarakat internasional untuk melakukan intervensi. Karena kudeta Fiji bukan merupakan tragedi kemanusiaan. Situasi politik di Fiji merupakan masalah internal dan hanya bisa diselesaikan oleh penduduk Fiji menggunakan proses demokrasi dan konstitusional.³⁰

E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka sikap Australia yang mengecam kudeta militer Fiji tetapi tidak mau mengirimkan pasukannya ke Fiji didasarkan pada, pertama kewajiban untuk melindungi warga negara Australia yang ada di Fiji. Ketika terjadi kudeta, ada sekitar 7 ribu warga negara Australia sedang berada di Fiji Kedua, konflik antarelite di Fiji tidak menimbulkan instabilitas. Kudeta Fiji tidak melibatkan rakyat banyak, berlangsung dengan tenang, tanpa pertumpahan darah dan tidak memakan korban. Krisis politik Fiji bukanlah merupakan kepentingan Australia karena secara keseluruhan kudeta militer yang terjadi di Fiji relatif tidak mengganggu

²⁹ *Australia Meningkatkan Kecaman Terhadap Pemimpin Kudeta Militer Fiji* (diakses pada 28 Juni 2008); sumber <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-12/2006-12-12-voa2.cfm>

³⁰ Brij V Lal, *Anxiety, Uncertainty, and Fear in Our Land 1: Fiji's Road to Military Coup 2006* (diakses pada 9 Mei 2009); sumber http://www.fijilive.com/archive/showpdf.php?pdf=2007/06/Dr_Brij_Lal.pdf

kepentingan nasional Australia. Oleh karena itu intervensi Australia belum dibutuhkan untuk mengamankan situasi di Fiji. Ketiga, reaksi internasional terhadap kudeta Fiji menjadi pertimbangan Australia dalam menjaga eksistensinya di mata internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus dan baik maka penulis membatasi penelitian ini dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menyertakan berbagai peristiwa yang terjadi di luar tahun tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tetapi terjadi di luar jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan jangka waktu ini juga mencakup perihal data dan informasi yang berkenaan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Penulis juga melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Australia, dimana penulis menitikberatkan pada keputusan yang berhubungan dengan masalah pengiriman pasukan ke Fiji. Untuk selanjutnya permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teoritik serta data yang ada.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu dari kerangka teoritik yang digunakan akan ditarik hipotesa berdasarkan pada

data-data yang diperoleh. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu data-data yang diperoleh berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, dan lain-lain. Selain itu penulis juga mengambil data yang berasal dari internet.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan ditulis ke dalam lima bab yang pembagiannya akan menjadi seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI POLITIK DALAM NEGERI FIJI

Berisi penjelasan tentang kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap politik dalam negeri Fiji, disini dijelaskan bagaimanapun elite Fiji berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu juga dijelaskan mengenai terjadinya konflik dalam negeri Fiji yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antarelite tersebut.

BAB III POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA TERHADAP FIJI

Berisi penjelasan tentang faktor-faktor yang menentukan dalam pembuatan keputusan luar negeri yang menjadi arah bagi kebijakan luar

negeri Australia dan penjelasan tentang kepentingan nasional Australia. Selain itu dijelaskan juga mengenai kedekatan antara Australia dengan Fiji meliputi berbagai keterlibatan Australia di Fiji dan pasang surut hubungan antara kedua negara tersebut.

BAB IV REAKSI AUSTRALIA TERHADAP KUDETA FIJI

Berisi penjelasan tentang pertimbangan-pertimbangan Australia sebelum mengambil keputusan dan alasan mengapa Australia tidak mau mengirimkan pasukannya ke Fiji ketika terjadi kudeta padahal Australia mengecam tindakan kudeta tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.